

EVALUASI KEBIJAKAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SEMARANG

Henessy Quinster, Dyah Lituhayu, Amni Zarkasyi Rahman

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Kebijakan Parkir di tepi jalan umum di Kota Semarang memiliki potensi dalam peningkatan pendapatan asli daerah namun selama ini belum berhasil mencapai target pendapatan retribusi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi kebijakan parkir di tepi jalan umum di Kota Semarang serta melihat faktor-faktor penghambat dari penerapan kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian berada di Kota Semarang dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan informan yang telah ditentukan dengan teknik purpose sampling dan telaah dokumen serta literasi yang memiliki keterkaitan dengan topik. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dilapangan saat mengimplementasikan kebijakan parkir di tepi jalan umum dilihat dari tidak tercapainya target retribusi setiap tahun. Untuk memenuhi target pencapaiannya yang telah ditetapkan, maka aparat disarankan untuk memaksimalkan perannya dalam pengelolaan parkir pinggir jalan umum, meningkatkan pengawasan, pendampingan serta kerjasama dari masyarakat untuk berkontribusi dan membangun komitmen demi tercapainya target dalam kebijakan tersebut.

Kata Kunci : Evaluasi, Parkir, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menerapkan sistem desentralisasi dimana pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah termasuk masyarakat dengan memberikan otonomi daerah. Otonomi daerah memiliki beberapa fungsi salah satunya adalah untuk memberikan kewenangan seluasnya kepada kota maupun kabupaten dengan harapan agar daerah tersebut dapat menjadi daerah yang mandiri dan dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sehingga dapat menjadi sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya akan dialokasikan untuk pembangunan daerah.

Sumber-sumber PAD didapatkan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang disahkan. Dalam tulisan ini berfokus pada salah satu sumber PAD yaitu dari sisi retribusi. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa retribusi dibagi dalam tiga golongan

yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu.

Dalam penelitian ini penulis akan membahas salah satu sektor potensial dari retribusi jasa umum yaitu retribusi parkir di tepi jalan umum yang memiliki sebanyak 1127 titik parkir yang diharapkan dapat memberikan kontribusi paling besar pada PAD Kota Semarang. Namun pada tahun 2018 ditargetkan penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum sebesar Rp. 3.850.000.000 namun realisasinya sebesar Rp. 3.012.751.000 dengan persentasi 78,25% mengalami peningkatan penerimaan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019 ditargetkan penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum sebesar Rp. 4.235.000.000 namun realisasinya sebesar Rp. 2.323.284.000 dengan persentasi 54,86% mengalami penurunan penerimaan yang cukup signifikan.

Pengelolaan parkir di Kota Semarang sering ditemui beberapa penyimpangan sehingga tidak maksimalnya pencapaian target. Pemasalahan parkir di Kota Semarang berasal dari aktor yang terlibat

langsung yaitu juru parkir yang tidak taat dengan aturan-aturan yang telah berlaku, serta munculnya praktek parkir liar yang mana pendapatannya tidak disetorkan kepada pemerintah.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan parkir di tepi jalan umum di Kota Semarang. Mengetahui dan menganalisis faktor penghambat atau kendala-kendala dalam pencapaian target PAD Kota Semarang dari sektor retribusi parkir di tepi jalan umum.

B. Metode Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu suatu cara yang dilakukan peneliti untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik sifatnya tertulis maupun lisan dari subjek peneliti dan perilaku yang diamati (Moleong, 2012 : 6).

Situs penelitian dalam penelitian ini adalah UPT Bidang Perparkiran Dishub Kota Semarang serta penentuan subjek penelitian atau informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder diperoleh dari hasil wawancara secara

langsung dari informan yang telah ditentukan dan telaah dokumen.

C. Landasan Teori

1. Evaluasi Kebijakan Publik

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assesment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi (Dunn, 2000:608).

Menurut Bridgman & Davis (2017 : 4), menjelaskan dalam melaksanakan

evaluasi kebijakan publik terdapat empat komponen dasar yaitu Input, Proses, Output, dan Outcome.

2. Faktor Penghambat Kebijakan

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan seringkali didapati beberapa faktor yang menjadi penghambat tujuan seperti yang dinyatakan oleh Grindle (Suwarno,2008) antara lain, yaitu :

1) Isi Kebijakan (*Content of policy*)

a. Tipe Manfaat

Menunjukkan dan menjelaskan manfaat yang dimunculkan.

b. Tingkat perubahan yang diharapkan

Seberapa besar pencapaian transisi yang akan dilakukan dengan skala implementasi kebijakan.

c. Kepentingan yang mempengaruhi

Melihat seberapa besar pengaruh kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

d. Keterlibatan sumberdaya

Dukungan dari sumberdaya yang digunakan dalam suatu kebijakan.

e. Pelaksanaan program

Tingkat kompetensi dari pelaksana kebijakan.

f. Pengambilan keputusan

Memaparkan pengambilan keputusan dari suatu kebijakan.

2) Lingkungan implementasi (*Context of implementation*)

a. Kepatuhan dan daya tanggap

Tingkat kepatuhan, respon dan daya tanggap pelaksana kebijakan.

b. Karakteristik lembaga

Personalitas penguasa atau lembaga yang memiliki pengaruh pada kebijakan.

c. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor

Otoritas, kekuatan dan strategi serta kepentingan para aktor dalam pelaksanaan kebijakan.

D. Pembahasan

1. Input

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang terlibat dalam kebijakan parkir di Kota Semarang adalah petugas dari dinas perhubungan yang terdiri dari juru pungut, staf pendataan dan staf perizinan, serta juru parkir.

Juru pungut merupakan orang yang ditugaskan Dinas Perhubungan

yang memiliki tugas untuk memungut dan menyetorkan uang pendapatan parkir sampai dengan kepada subbagian keuangan yang kemudian akan disetorkan kepada pemerintah kota Semarang. Syarat untuk menjadi juru parkir serta titik parkir baru dapat datang langsung ke Dinas Perhubungan dengan menunjukkan kartu identitas diri dan juga surat rekomendasi dari pemilik usaha jika ada. Kemudian dari Dinas Perhubungan akan melakukan survei lapangan untuk menilai apakah titik parkir tersebut sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

b. Sarana Prasarana

Dinas perhubungan Kota Semarang berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelayanan parkir seperti atribut juru parkir, kartu tanda pengenal dan karcis parkir, serta rambu-rambu lalu lintas yang menunjukkan lokasi parkir. Sedangkan untuk sarana dan prasarana dilokasi parkir sendiri menjadi tanggung jawab juru parkir.

2. Proses

a. Pemungutan Retribusi

Pemungutan retribusi dilakukan dengan asas kebiasaan, dimana pengguna pelayanan parkir terbiasa enggan menerima atau mempertanyakan karcis parkir yang berfungsi sebagai tanda bukti pembayaran atas pelayanan parkir dan menjadi faktor penentu besaran setoran yang berikan kepada pemerintah kota. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan parkir adalah perilaku dan kesadaran masyarakat pengguna layanan parkir, serta pemahaman masyarakat atas aturan-aturan dalam kebijakan yang berlaku guna meminimalisir munculnya permasalahan-permasalahan parkir di Kota Semarang. Dalam melaksanakan tugas pemungutan seringkali juru parkir mengelabui juru pungut dengan dalih telah melakukan penyetoran kepada juru pungut yang lainnya dengan tujuan untuk tidak melakukan penyetoran kepada juru pungut yang sedang bertugas. akibat dari hal ini adalah setoran harian tidak mencapai target yang telah ditentukan.

b. Kerjasama

Guna meminimalisir permasalahan yang timbul dilapangan pihak dinas perhubungan Kota Semarang melakukan kerjasama dengan pihak lain yaitu tim saber pungli kepolisian Kota Semarang hal ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan praktik parkir liar serta memaksimalkan pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Semarang.

Kendala yang sering didapati dilapangan adalah kurangnya partisipasi dan kerjasama masyarakat. Perilaku masyarakat yang ingin instan dan mudah menjadikan terhambatnya tujuan dari kebijakan untuk membuat lalu lintas menjadi lancar dan tertib. Dan juga sikap dari juru parkir yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh dinas perhubungan Kota Semarang.

3. Faktor Penghambat

a. Kepentingan yang mempengaruhi

Pihak Dinas Perhubungan bertugas untuk menjalankan kebijakan parkir di tepi jalan umum yang tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban parkir di tepi jalan umum

sehingga masyarakat merasakan aman dan nyaman saat berkendara. Namun tak jarang ditemui adanya praktik parkir liar yang menghambat tercapainya tujuan tersebut. Pihak juru parkir menjadikan faktor ekonomi adalah faktor pendorong munculnya pelanggaran-pelanggaran dilapangan. Guna mencapai tuntutan setoran yang harus mereka capai setiap harinya. Penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan yang bekerjasama dengan tim saber pungli untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran dilapangan.

b. Kepatuhan dan daya tanggap

Dinas perhubungan Kota Semarang melihat adanya potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah namun dalam prakteknya dilapangan muncul kendala yaitu sikap dan perilaku dari juru parkir yang mengambil keuntungan atas uang retribusi. Pelanggaran yang dilakukan seperti menariki uang parkir yang melebihi dari tarif yang sudah ditentukan, serta tidak memberikan karcis parkir.

E. Kesimpulan

1. Input

Indikator input dalam evaluasi kebijakan parkir di tepi jalan umum di Kota Semarang dilihat dari dua aspek yakni sumber daya manusia dan sarana prasarana. Sumber daya manusia yang menjadi aktor pelaksana kebijakan masih terbilang kurang kompeten dalam menjalankan tugasnya, penyebabnya adalah dalam pelaksana kebijakan masih kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni sehingga menghalangi atau menghambat tercapainya tujuan dari kebijakan parkir di Kota Semarang.

Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana pada tiap titik parkir dinilai sudah cukup memadai. Dinas Perhubungan selaku penyelenggara kebijakan mampu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dilapangan.

Dampak ekonomi yang dirasakan dari adanya kebijakan parkir di tepi jalan umum ini memunculkan lapangan pekerjaan yaitu juru parkir yang mana dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat sekitarnya.

2. Proses

Proses pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dilaksanakan dengan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang dinilai masih kurang maksimal, karena proses pemungutan yang masih melalui beberapa pintu sehingga menghambat tercapainya target dari retribusi yang telah ditentukan. Untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran dilapangan Dians Perhubungan melakukan kerjasama dengan tim saber pungi namun kerjasama tersebut belum memberikan hasil yang sempurna sepenuhnya karena masih ditemui pelanggar-pelanggar yang tidak juga jerah dalam melakukan pelanggaran.

3. Faktor Penghambat

Kebijakan parkir di tepi jalan umum kota semarang diatur dalam peraturan daerah kota semarang nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. Dalam pelaksanaannya tujuan dari peraturan daerah tersebut masih belum terwujud dilihat dari belum tercapainya target-target pendapatan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Dinas Perhubungan berusaha untuk mencapai tujuan dari kebijakan parkir yaitu dengan menciptakan

ketertiban lalu lintas dan kenyamanan berlalu lintas bagi pengguna jasa parkir dan pengguna jalan umum namun dari pelaksana kebijakan ada faktor ekonomi yang harus dicapai sehingga melakukan pelanggaran-pelanggaran dari aturan yang ada.

Kurangnya tingkat kepatuhan dari juru parkir atas aturan yang telah ditetapkan, sehingga sering ditemukan pelanggaran-pelanggaran dilapangan.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat penulis berikan adalah pemerintah Kota Semarang khususnya Dinas Perhubungan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih memahami bagaimana pelaksanaan kebijakan parkir di tepi jalan umum yang berlaku. Adanya pengendalian, pengawasan serta penindakan tegas bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran atas aturan yang berlaku, serta melakukan riset dan pengembangan inovasi untuk membuat sistem pembayaran parkir yang lebih efektif dan efisien.

F. Daftar Pustaka

Buku

Agustino, Leo. 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. CV. Alfabeta Cetakan Ke- V.

Arikunto S. 2006. Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik, ed revisi VI. Penerbit PT Rineka Cipta : Jakarta

Moleong. 2005. Metodologi Kualitatif edisi revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. 2017. Public Policy Edisi keenam. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.

Subarsono. 2012. Analisis Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2006. Metode penelitian pendidikan “Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D”. Bandung : Alfabeta

Wibawa, Samodra. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta : Raja Grafindo.

Jurnal

Farida, Nur.2017. “Implementasi peraturan daerah kota semarang nomor 2 tahun 2012 pada kasus retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum jalan pandanaran.” Universitas Diponegoro.

Nursepto, Dwi, dan Yoserizal. 2013. “Implementasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum”. Jurnal Administrasi Pembangunan Volume 1 No 2.

Rendra, Miswandaru. 2017. "Evaluasi Kebijakan Kenaikan Tarif Parkir Tepi Jalan Umum Menurut Perda No 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang." Jurnal Ilmu Pemerintahan. Universitas Diponegoro.

Retno, Ratih. 2019. "Evaluasi Pengelolaan Parkir Di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung." Skripsi Ilmu Pemerintahan. Universitas Lampung.

Riyanda, Riko dan Timbul Dompok. 2017. "Kebijakan Parkir Kota Batam Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah". Jurnal Niara Volume 10 No 1.

Dokumen

Badan Pusat Statistik : Semarang Dalam Angka 2013-2017.

Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kota Semarang tahun 2018

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang.

Website

Achmad Miftahur, Rozak. Teknik Evaluasi Program Model CIPP (Context, Input, Process, Product). Diunduh dari www.edukasi.kompasiana.com pada tanggal 7 Desember 2018.

Kebocoran penerimaan PAD dari retribusi parkir umum disorot DPRD Kota Semarang dalam

<http://jateng.tribunnews.com/2018/05/18/kebocoran-penerimaan-pad-dari-retribusi-parkir-umum-disorot-dprd-kota-semarang?page=all>. Diakses pada 29 November 2018.

Retribusi parkir kota semarang diduga bocor melalui <http://www.bisnisjateng.com/index.php/2011/03/retribusi-parkir-kota-semarangdiduga-bocor>. Diakses pada 29 November 2018.